Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat

Renja
(Rencana Kerja)

TAHUN 2021

dinkessulbar

dinkessulbar

dinkessulbar

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS KESEHATAN
Jl. Abd.Malik Pattana Endeng (Kompleks Kantor Gubernur Sulbar) Mamuju 91511

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 292 Tahun 2020 .

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) 2021;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) \Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah sebagai Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Di samping itu juga merupakan tolok ukur dalam menilai pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi);

KETIGA	:	Ruang Lingkup Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 meliputi Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, UPTD Balai Labkes dan Transfusi Darah;
KEEMPAT	:	Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan Indikator Kinerja dan Kegiatan yang telah ditetapkan lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ;
KELIMA	:	Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 disusun sebagai berikut : BAB I Pendahuluan; BAB II Evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu; BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan; BAB IV Penutup
KEENAM	:	Isi beserta uraian rincian sebagaimana tersebut Poin KELIMA terdapat dalam naskah lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan;
KETUJUH	:	Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, UPTD Balai Labkes dan Transfusi Darah dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran harus berdasarkan dan atau berpedoman kepada Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
KEDELAPAN	:	Rencana Kerja ini dapat dilakukan evaluasi dan revisi sepanjang dibutuhkan dan atau diselaraskan dengan situasi dan kondisi serta perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal dan eksternal;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 20 Juli 2020

Kepala Dinas

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS KESEHATAN

dr. Muhammad Alief Satria Lahmuddin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenanan-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 dapat selesai dikerjakan.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022, dijadikan sebagai acuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD

Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang sesuai visi Gubernur Sulawesi Barat yaitu ***"Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi"***

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan manjadi sangat penting dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di Sulawesi Barat.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021. Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Rencana Kerja ini .

Mamuju, 31 Agustus 2020

Kepala Dinas ,

dr. Muhammad Alief Satria Lahmuddin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……...…… i

Daftar Isi ……..……..…… ii

Bab I Pendahuluan …… 1

1.1 Latar Belakang …… 1

1.2 Landasan Hukum …… 3

1.3 Maksud dan Tujuan …… 4

1.4 Sistematika Penulisan …… 5

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019…….……..... 6

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan …… 22

Bab IV Penutup …….……..…… 32

Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai *stakeholder* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Gubernur terpilih H. M. ALI BAAL MASDAR dan Hj. ENNY ANGGRAENY sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode Tahun 2017-2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53/P Tahun 2017 Tanggal 10 Mei 2017 dan dilantik oleh Presiden pada tanggal 12 Mei 2017. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari visi-misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Stategis (Renstra) OPD dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2020 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah ;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
l. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
m. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, terkait dengan Program Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan *Millennium Development Goals (MDGs)* ;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tentang Tahap Perencanaan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

o. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

p. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;

q. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;

r. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025 ;

s. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ;

t. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Thn 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

u. Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

v. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;

w. Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 2021 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019, dan memuat perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 serta untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja 2021 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan T.A 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB VI : Penutup

`LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Esensi pembangunan berbasil kinerja adalah orientasi untuk mendorong prubahan dengan menggunakan program / kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan, perubahan pada keluaran hasil maupun dampak. Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengn prinsip good govermance dengan pilar akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandate suatu instansi dalam pelayanan public yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses di mana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akusisi yang dilakukan, berdasarkan apa yang diperjanjikan sebelumnya di dalam Perjanjian Kinerja (perkin).

Tujuan Pengukuran kinerja ini adalah :

1. Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan;
2. Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan kepada indikator inputs saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator *outputs*, *outcomes*, *benefits*, dan *impacts*;
3. Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan.

Pengukuran atas pencapaian sasaran dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, mengikuti modul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
1.	>85-100	Memuaskan
2.	>75 – 85	Sangat Baik
3.	>65 – 75	Baik
4.	>50 – 65	Cukup Baik
5.	>30 – 50	Agak kurang
6.	0 – 30	Kurang

B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

Tujuan dalam penetapan IKU adalah : (1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajeme kinerja secara baik. (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akutanbilitas kinerja. Pengukuran kinerja menggunakan

metode yang diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja pada dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Analisa Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	1	Angka Harapan Hidup	66,33	64,82	97,72%
		2	Persentase Balita Gizi Buruk	18,83%	0,29%	1,54%
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	3	Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi	10	31	310%
		4	Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup	37	49	67,57%
		5	Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi	316	323	97,78%
		6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	76.02%	77,5%	101,95%
		7	Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%	100%	100%	100%
		8	Prevalensi HIV	<1	<1	100%
		9	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	92%	78%	84,78%

		10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%
		11	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%
		12	Persentase Penggunaan Obat Rasional	70%	90,06%	126,66%
		13	Rasio dokter per satuan penduduk	0.35	0,30	85,71
		14	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,35	0,30	85,71
		15	Jumlah Desa/Kel yang stop BABS	50%	97%	194
		16	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	75%	83,64	111,52
		17	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	67%	100%	149,25

Dari table 2.2 tersebut diatas terlihat bahwa tahun 2019, dari 17 indikator kinerja utama (IKU) dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yang telah tetapkan. IKU yang pencapaiannya dibawah target, yaitu :

1) Persentase Balita Gizi Buruk dengan target 18,83% dan realisasi sebesar 0,29%. Capaian kinerja untuk persentase balita gizi buruk sebesar 1,54%.

   Rendahnya capaian kinerja indikator prevalensi gizi buruk menjadi indikasi bahwa capaian program penanganan gizi buruk sangat berhasil atau kinerja pengelola program gizi yang tidak maksimal. Indikator prevalensi gizi buruk merupakan indikator yang semakin kecil realisasi menunjukkan keberhasilan program. Namun angka realisasi yang sangat jomplang dengan target yang ditetapkan memerlukan analisis yang lebih mendalam secara program teknis untuk penjabarannya.

   Sedangkan berdasarkan nilai realisasi pencapaian kinerja dari 17 indikator kinerja utama

(IKU), nilai capainnya tergolong dalam kriteria ***"Berhasil / Tercapai*** dengan rata-ratacapaian 112,6%.

2. Analisa Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja periode sebelumnya tahun 2017 dan 2018 beberapa indikator yang capaiannya mengalami penurunan maupun peningkatan yaitu **:**

1) Angka harapan hidup (AHH) di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 mencapai 64,30, lebih rendah dibandingkan target Usia harapan hidup 64,75 dengan capaian kinerja 99,37%.

   AHH pada tahun 2018 mencapai 65,10 dengan target pada tahun yang sama sebesar 65,59, sehingga capaian kinerja sebesar 98,46%. Selanjutnya AHH Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 65,73 tahun dari target 66,97 tahun dengan capaian kinerja 97,72%. Capaian yang didapatkan oleh Sulawesi Barat dalam AHH mengalami penurunan 0,74 poin dibandingkan tahun 2018.

   Selain itu realisas AHH ini masih sangat rendah dibandingkan angka harapan hidup tingkat nasional yang mencapai angka 71,34 tahun. Kabupaten dengan AHH tertinggi di Sulawesi Barat adalah kabupaten Mamasa 70,75 tahun dan yang terendah kabupaten Majene dengan AHH 61.30 tahun.

2) Persentase balita gizi buruk di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 dengan capaian kinerja 1,54% mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan capaian tahun 2018 yang mencapai 114,14%. Tidak terdapat laporan capaian tahun 2017 terkait indikator ini.

3) Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi bertujuan agar puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

   Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas, diperlukan adanya penilaian

oleh fihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

Pada tahun 2019 sebanyak 33 puskesmas yang tersebar di 31 kecamatan (310%(di kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat di akreditasi. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 200%.

4) Jumlah Absolut Kematian Ibu per Kelahiran Hidup pada tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 38,1% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 67,57% namun masih sangat rendah.Target kasus kematian ibu yang diharapkan 37 kasus kematian ibu dan yang terjadi sebanyak 49 kasus kematian. Kabupaten Polewali Mandar merupakan penyumbang terbesar kasus kematian ibu dengan jumlah kasus 17 dan paling sedikit kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu dengan jumlah masing-masing 4 kasus. Capaian tahun 2019 sebesar 67,57% lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018. Semakin baiknya program kesehatan ibu dalam menekan terjadinya kasus kematian ibu menjadi salah satu penyebab menurunnya kasus kematian maternal / kematian ibu. Selain itu kegiatan pendampingan ibu hamil yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi di kabupaten Polewali Mandar dan Majene berkorelasi positif dengan penurunan kasus kematian ibu di 2 kabupaten tersebut.

Tabel 2.3

Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2017 - 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian		
				2017	2018	2019
1	Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	1	Angka Harapan Hidup	99,37	98,46	97,72%
		2	Persentase Balita Gizi Buruk	-	114,4	1,54%

2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	3	Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi	-	200%	310%
		4	Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup	-	38,1%	67,57%
		5	Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi	-	109,0	97,78%
		6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	107,00%	95%	101,95%
		7	Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%	100	100	100%
		8	Prevalensi HIV	100%	100%	100%
		9	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	79,8%	83%	84,78%
		10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%
		11	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%
		12	Persentase Penggunaan Obat Rasional	-	228%	126,66%
		13	Rasio dokter per satuan penduduk	-	50%	85,71
		14	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	-	50%	85,71
		15	Jumlah Desa/Kel yang stop BABS	-	224%	194%
		16	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	-	100%	111,52%

		17	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	-	100%	149,25%

Target yang diharapkan sesuai dengan indikator dalam rencana strategis dinas kesehatan sebanyak 37 kasus pada tahun 2019 dan yang tercapai sebanyak 49 kasus kematian. Determinan kesehatan dan sosial seperti status kesehatan ibu dan calon ibu yang masih rendah; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, jumlah dan penyebaran dokter tidak merata, sebaran rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis kebidanan dan kandungan; belum optimalnya pendayagunaan tenaga medis lain (spesialis anestesi, penyakit dalam, anak) yang ada di rumah sakit dalam penanganan kasus kegawatdaruratan obstetrik.

Prevalensi gizi buruk pada balita dengan capaian 1,54% masih sangat jauh dari capaian kinerja yang di harapkan. Dalam penyusunan target diharapkan terdapat 18,83% prevalensi balita gizi buruk di Sulawesi Barat namun yang terlaporkan dan tercatat melalui sarana pelayanan kesehatan sebesar 0,29%. Terdapat 2 asumsi untuk menggambarkan keadaan ini. Realisasi yang rendah menunjukkan bahwa terjadi keberhasilan yang besar dalam penanganan kesehatan gizi di Sulawesi Barat namun di sisi yang lain kemungkinan memunjukkan kinerja petugas yang tidak maksimal. Perlu analisis lebih mendalam secara program untuk penjabaran indikator ini.

Sedangkan rasio kebutuhan dokter tidak mencapai target disebabkan tugas pokok dinas kesehatan hanya sebagai fasilitasi kabupaten dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

Terdapat beberapa progam kementerian kesehatan yaitu nusantara sehat yang mendukung program kinerja dalam mencapai distribusi kebutuhan rasio dokter khusus daerah yang terpencil.

Beberapa penyebab dari permasalahan tersebut diatas antara lain :

1) Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program belum semuanya bersinergi.
2) Perencanaan anggaran program dan kegiatan belum berbasis capaian indicator

kinerja tahun anggaran.

3) Keterbatasan anggaran dalam mencapai indicator kinerja

4) Kesinambungan program antara bidang maupun program yang ada di dinas kabupaten belum optimal.Beberapa penyebab dari keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas antara lain

1) Adanya dukungan anggaran dan program peningkatan kapasitas pengelola program dari kementrian kesehatan.
2) Anggaran DAK yang langsung ke kabupaten sesuai petunjuk teknis sehingga capaian terealisasi terutama program akreditasi puskesmas.
3) Adanya anggaran APBN dan program kementerian kesehatan yang mendukung capaian kinerja OPD Dinas Kesehatan.

Solusi yang akan dilakukan pada berikutnya antara lain :

1) Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan harus lebih ditingkatkan dana diperbaiki antara pengelola program baik OPD dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten.
2) Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitive, aplikatif, tepat, jelas outcam dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta bersinergi antara program / kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.

3. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2019 realisasi anggaran dinas kesehatan provinsi Sulawesi Barat sebesar 93,20% dengan jumlah anggaran 26.764.354.639,65 dengan realisasi 24.945.205.179. Terjadi peningkatan alokasi anggaran pada dinas kesehatan jika dibandingkan dengan periode tahun anggaran sebelumnya. Anggaran kesehatan jika dibandingkan dengan total berjumlah 100 % di luar belanja tidak langsung karena bantuan iuran premi program jaminan kesehatan masuk dalam anggaran OPD dinas kesehatan. Berikut ini jumlah anggaran tahun 2014 hingga 2019 yang dialokasikan pada dinas kesehatan.

Tabel 3.4 Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2019

No	Tahun	Pagu Anggaran
1	2014	30.915.782.000
2	2015	24.425.072.544
3	2016	12.953.526.200
4	2017	11.395.000.000
5	2018	30.103.133.122
6	2019	26.764.354.639,65

Agar dapat mewujubkan target capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis. disampaikan anggaran yang telah dialokasikan pada dinas kesehatan tahun 2019.

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama		Anggaran	
				Alokasi (Rp)	%
1	Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	1	Angka Harapan Hidup	0	0
		2	Persentase Balita Gizi Buruk	1.172.379.816	4,38038
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	3	Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi	950.000.000	3,55
		4	Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup	1.090.530.500	4,07
		5	Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi	0	0
		6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	0	0
		7	Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%	0	0
		8	Prevalensi HIV	55.820.000	0,21
		9	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	74.070.000	0,28
		10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0	0
		11	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	0
		12	Persentase Penggunaan Obat Rasional	754.357.100	2,82
		13	Rasio dokter per satuan penduduk	0	0
		14	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0	0
		15	Jumlah Desa/Kel yang stop BABS	369.920.000	1,38
		16	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	15.550.326.942,04	58,10
		17	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	603.831.500	2,26
Alokasi Anggaran Untuk Mencapai Target Sasaran IKU				20.621.235.858	77,05
Total Anggaran Belanja Langsung				26.764.354.640	100

Pada tahun 2019, alokasi anggaran belanja langsung pada dinas kesehatan provinsi Sulawesi barat sebesar Rp. 26.764.353.640 sebesar 77,05 % atau Rp. 20.621.235.858 digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan renstra. Indiator pendukung selain IKU (Indikator Kinerja Utama) sebesar 23,95 % atau Rp. 6.143.118.782 digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan capaian target IKU, antara lain :

Tabel 2.6

No	Uraian
1	2
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Kebijakan dan Management Pembangunan kesehatan
7	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah pembangunan kesehatan masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan anggaran yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Laporan Alokasi dan realisasi anggaran kegiatan tahun 2018 pada dinas kesehatan provinsi Sulawesi barat, dilihat table berikut ini :

Tabel 2.7

Program / Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persen Realisasi (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1.703.779.000**	**1.557.903.689**	**91,44**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	496.400.000	431.588.100	86,94
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	240.360.000	202.122.384	84,09
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	29.100.000	15.058.268	51,75
Penyediaan jasa kebersihan kantor	55.040.000	39.675.000	72,08
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	27.260.000	26.887.000	98,63
Penyediaan alat tulis kantor	81.789.000	79.337.000	97,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.600.000	27.450.000	99,46
Penyediaan peralatan rumah tangga	24.000.000	23.939.500	99,75
Penyediaan makanan dan minuman	54.582.000	54.457.262	99,77
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	374.248.000	372.853.775	99,63
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	233.400.000	232.535.400	99,63
Penyediaan Jasa Publikasi Media	60.000.000	52.000.000	86,67

Cetak			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**540.272.000**	**354.508.758**	**65,62**
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	184.590.000	7.000.000	3,79
Pengadaan peralatan gedung kantor	109.600.000	108.130.000	98,66
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	77.562.000	76.420.000	98,53
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	75.070.000	74.834.429	99,69
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93.450.000	88.124.329	94,30
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**129.100.000**	**126.676.000**	**98,12**
Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya	129.100.000	126.676.000	98,12
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**99.600.000**	**86.143.117**	**86,49**
Pendidikan dan Pelatihan Formal	99.600.000	86.143.117	86,49
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**262.671.000**	**255.375.000**	**97,22**
Penyusunan laporan keuangan semesteran	10.060.000	9.730.000	96,72
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.587.000	10.222.000	96,55
Penyusunan RKA/DPA-SKPD	19.555.000	16.345.000	83,58
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	19.555.000	18.125.000	92,69
Penyusunan Laporan Keterangan Pertangungjawaban SKPD	6.576.000	6.552.000	99,64
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Bendahara	14.684.000	13.264.000	90,33
Penyusunan Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	157.535.000	157.519.000	99,99
Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	24.119.000	23.618.000	97,92
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	**739.999.100**	**636.264.200**	**85,98**
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	65.060.000	12.630.500	19,41
Penyediaan Operasional di IFP	40.095.000	24.374.600	60,79
Pelayanan Kefarmasian	424.779.000	424.779.000	100,00
Pemantauan Indikator Penggunaan Obat Rasional (Ispa Non Pneumonia, Diare Non Spesifik, Myalgia)	29.460.000	27.910.000	94,74
Pemusnahan Obat Kadaluarsa	43.405.000	24.730.000	56,98
Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pada Stakelholder	137.200.100	121.840.100	88,80
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	**100.000.000**	**78.933.200**	**78,93**
Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Jiwa	100.000.000	78.933.200	78,93
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	**603.831.500**	**536.400.000**	**88,83**
Pengadaan promkes kit	100.000.000	98.800.000	98,80

Promosi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dalam Rangka Mewujudkan Sulbar Marasa	160.000.000	151.114.000	94,45
Penggerakan Masyarakat Perilaku Sehat dalam Germas	149.969.500	126.572.000	84,40
Pembinaan Desa Siaga Aktif Tingkat Provinsi	193.862.000	159.914.000	82,49
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	**1.140.069.816**	**1.016.529.653**	**89,16**
Pendampingan Balita Gizi Buruk Dan Gizi Kurang	467.690.000	439.066.853	93,88
Penyusunan Perencanaan Partisipatif dalam mengurangi dan mencegah Stunting, Low Birth Wiegh dan Malnutrition	150.000.000	105.776.000	70,52
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi Ibu dan Anak Berkelanjutan Melalui Penyelamatan 1000 Hpk	522.379.816	471.686.800	90,30
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	369.920.000	275.745.576	74,54
Pemicuan Jamban Sehat	169.920.000	151.560.576	89,20
Orientasi STBM stunting Kepada Stakeholder dan Tokoh Masyarakat	200.000.000	124.185.000	62,09
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	**950.000.000**	**814.200.200**	**85,71**
Kegiatan tim pelayanan Kesehatan bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasa & Kepulauan (DTPK)	500.000.000	458.925.400	91,79
Pembinaan Teknis PIS-PK	250.000.000	200.009.200	80,00
Workshop Penguatan pembinaan puskesmas oleh Dinkes Provinsi & Dinkes Kabupaten	200.000.000	155.265.600	77,63
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	**63.000.000**	**36.566.751**	**58,04**
Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak	63.000.000	36.566.751	58,04
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	**1.058.730.500**	**835.531.940**	**78,92**
Orientasi teknis Pelaksanaan kelas Ibu	134.680.000	43.773.000	32,50
TOT Audit Maternal Perinatal	138.880.000	98.562.040	70,97
Pendampingan Ibu Hamil Dalam Rangka Menurunkan Jumlah Kematian Ibu	401.350.000	340.030.300	84,72
Pertemuan Koordinasi Terkait Penggunaan Buku KIA	150.000.000	136.135.000	90,76
Kolaborasi Lintas Program dalam Peningkatan Kualitas Anc (Anc Terpadu)	233.820.500	217.031.600	92,82
Program Kebijakan dan Management Pembangunan kesehatan	**1.402.324.670**	**1.076.940.200**	**76,80**
Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Sulawesi	130.000.000	96.222.000	74,02

Barat			
Monitoring dan Evaluasi DAK kesehatan	75.000.000	70.504.000	94,01
Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Sulawesi Barat Penurunan AKI -AKB dan Sanitasi	25.575.550	25.525.300	99,80
Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Kuangan	72.407.000	61.842.000	85,41
Penyusunan Perencanaan Kesehatan Berbasis SPM Kesehatan	100.000.000	71.833.900	71,83
Pertemuan Koordinasi Teknis Desa MARASA	350.000.000	235.833.000	67,38
Fasilitasi dan Intevensi Program Marasa Bidang Kesehatan	649.342.120	515.180.000	79,34
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**157.300.000**	**145.045.000**	**92,21**
Penilaian Tenaga kesehatan Teladan di Puskesmas	107.300.000	97.105.000	90,50
Evaluasi Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based dan secara individu (Nusantara Sehat)	50.000.000	47.940.000	95,88
Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	**112.876.000**	**74.197.000**	**65,73**
Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK)	62.876.000	29.721.000	47,27
Monev dan Bimbingan Teknis Data Program keluarga Sehat	50.000.000	44.476.000	88,95
Program Pelayanan Kesehatan Perorangan	**1.041.753.112**	**954.302.295**	**91,61**
Pemeriksaan pemantapan mutu hasil dari Laboratorium yang ada di Kabupaten	106.000.000	105.913.700	99,92
Peningkatan pelayanan kesehatan di Balai Layanan Kesehatan (BLK)	735.753.112	666.652.535	90,61
Dana Alokasi Khusus (DAK) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	200.000.000	181.736.060	90,87
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	**738.801.000**	**569.347.500**	**77,06**
Penjaringan Penderita TB di Desa	157.190.000	97.330.000	61,92
Bimtek Pelaksanaan Pelayanan Posbindu PTM	111.770.000	81.136.500	72,59
Pelacakan kasus AFP	25.276.000	9.605.000	38,00
Pertemuan evaluasi surveilans PD3I	64.152.000	56.026.000	87,33
Fasilitasi Cold Room	25.120.000	25.000.000	99,52
Bimtek program P2 ISPA	49.115.000	34.205.000	69,64
Penguatan Sistem Surveilans Malaria (e-Sismal)	38.250.000	36.020.000	94,17
Layanan VCT mobile	55.820.000	45.935.000	82,29
Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas Mikroskopis	38.060.000	35.440.000	93,12
Pelaksanaan POPM Kecacingan dalam rangka intervensi Stunting	97.808.000	77.770.000	79,51
Pemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis	76.240.000	70.880.000	92,97
Program Jaminan Kesehatan	**15.550.326.942**	**15.513.131.600**	**99,76**

Pemenuhan Bantuan Iuran Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah	15.368.786.942	15.365.173.600	99,98
Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	86.580.000	71.370.000	82,43
Advokasi Pelaksanaan JKN Menuju Universal Health Coverage (UHC)	94.960.000	76.588.000	80,65

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Dalam upaya mencapai visi “Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Barat yang Maju dan Mala’biq” dan salah satu misi 1 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal- hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran adalah Meningkatnya derajat kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi dengan indikator sasaran sebagai berikut :

   1. Angka Harapan Hidup
   2. Persentase Balita Gizi Buruk

b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan, dengan indicator sasaran sebagai berikut :

   1. Angka Kematian Ibu
   2. Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak
   3. Regionalisasi Rujukan
   4. Jumlah RSUD yang terakreditasi
   5. Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi
   6. Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup
   7. Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi
   8. Angka kelangsungan hidup bayi
   9. Angka kematian balita
   10. Angka kematian neonatal
   11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

12. Cakupan pelayanan anak balita
13. Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
14. Persentase Anak Baduta dengan stunting
15. Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%
16. Prevalensi HIV
17. Jumlah Kabupaten / Kota dengan eliminasi malaria
18. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
19. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
20. Cakupan balita pneumonia yang ditangani
21. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
22. Penderita diare yang ditangani
23. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
24. Persentase Penggunaan Obat Rasional
25. Pengawasan obat dan makanan
26. Rasio dokter per satuan penduduk
27. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
28. Persentase pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang terlatih
29. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA
30. Jumlah Institusi yang mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
31. Jumlah Desa/Kel yang stop BABS
32. Jumlah Sarana Air Minum (SAM) yang memenuhi syarat kesehatan
33. Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan
34. Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
35. Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
36. Jumlah Dokumen kebijakan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pembangunan kesehatan yang Berkualitas
37. Jumlah desa yang difasllitasi Gerakan Sulbar Marasa
38. Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota Menyusun Profil Kesehatan
39. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
40. Jumlah kunjungan Rawat Jalan di UPTD Balai kesehatan
41. Jumlah Orang yang di donor
42. Jumlah Pemeriksaan sampel/sediaan di Labkesda

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang terdidik, Sehat dan Berbudaya	1	Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Angka Harapan Hidup	64.75	65.59	66.33	66.97	67.55	67.55
				Persentase Balita Gizi Buruk	23.23	21.03	18.83	16.63	14.43	12.23
		2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak	0	0	1	0	1	0
				Regionalisasi Rujukan	0	0	1	0	1	0
				Jumlah RSUD yang terakreditasi	2	1	1	1	1	1
				Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi	1	12	10	10	10	10
				Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiranhidup	47	42	37	32	27	22
				Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi	379	337	316	257	198	148
				Angka kelangsungan hidup bayi	985	992	993	994	995	997
				Angka kematian balita	10	10	9	8	7	7

				Angka kematian neonatal	11	11	11	11	10	10
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	71.83	73.01	76.02	79.03	82.04	85.05
				Cakupan pelayanan anak balita	81.5	84.72	86.94	89.2	92.4	95
				Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI	75	60	65	70	75	80
				Persentase Anak Baduta dengan stunting	28.2	27.2	26.2	25.2	24.2	23.2
				Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%	16.67	83.33	100	100	100	100
				Prevalensi HIV	0.2	<1	<1	<1	<1	<1
				Jumlah Kabupaten / Kota dengan eliminasi malaria	2	3	4	6	6	6
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	77.5	90	92	94	96	98
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	86.41	88.16	89.91	91.66	93.42	95.17
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	13.22	13.48	13.74	14	14.25	14.51
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
				Penderita diare yang ditangani	65.1	88.71	100	100	100	100
				Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100
				Persentase Penggunaan Obat Rasional	60	65	70	75	80	85

				Pengawasan obat dan makanan	50	50	50	50	50	50
				Rasio dokter per satuan penduduk	0.23	0.32	0.35	0.37	0.39	0.41
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.28	0.32	0.35	0.37	0.39	0.41
				Persentase pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang terlatih	60	75	80	85	90	95
				Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	10	10	10	10	10
				Jumlah Institusi yang mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	100	50	50	50	50	50
				Jumlah Desa/Kel yang stop BABS	100	50	50	50	50	50
				Jumlah Sarana Air Minum (SAM) yang memenuhi syarat kesehatan	57581	8000	10000	10000	10000	10000
				Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan	556	100	100	100	100	100
				Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	62.27	70	75	80	85	90
				Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	17	33	67	83	100	100
				Jumlah Dokumen kebijakan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pembangunan kesehatan yang Berkualitas	14	1	1	1	1	1

				Jumlah desa yang difasllitasi Gerakan Sulbar Marasa	0	6	6	6	6	6
				Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota Menyusun Profil Kesehatan	7	7	7	7	7	7
				Persentase Kabupaten/ Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas	66.67	83.33	100	100	100	100
				Jumlah kunjungan Rawat Jalan di UPTD Balai kesehatan	7292	8450	8700	900	9300	9600
				Jumlah Orang yang di donor	0	30	80	120	160	200
				Jumlah Pemeriksaan sampel/sediaan di Labkesda	0	50	100	300	500	500

B. Program dan Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
   b) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
   c) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
   d) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
   e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
   d) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
   e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   f) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
   h) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
   i) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrasi Umum
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
   e) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
   f) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
   g) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   i) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   j) Penyediaan Alat Tulis Kantor
   k) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   l) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   m) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   n) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   o) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   p) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   q) Penyediaan Makanan dan Minuman

r) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

s) Pengadaan Mobil Jabatan

t) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

u) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

v) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

w) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

x) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

y) Pengadaan Mebeleur

z) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

aa) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

bb) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

cc) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

dd) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

ee) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

ff) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

gg) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

hh) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

ii) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

jj) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

kk) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

ll) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

mm) Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

nn) Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

   b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

   c. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

   d. Pengadaan Pakaian Korpri

   e. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

   f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

   g. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas

   h. Pemindahan Tugas PNS

   i. Pendidikan dan Pelatihan Formal

   j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

   k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
   a) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
   b) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
   c) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
   d) Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
   e) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
   f) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
   g) Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
   h) Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
   i) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
   j) Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan
   k) Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
   l) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   m) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
   a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
   b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
   c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
   d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
   e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
   f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
   g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
   h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
   i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
   j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
   k) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
   l) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
   m) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
   n) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
   o) Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
   p) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
   q) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional

r) Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

s) Pengelolaan Penelitian Kesehatan

t) Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
   a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

   b) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

   c) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
   a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

   b) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

   c) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
   a) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

   b) Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
   a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

   b) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
   a) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak

   b) Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik

2. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
   a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

   b) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
   a) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
   a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja bidang kesehatan dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Rencana Kerja merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu supra sistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup terhadap penyesuaian dan penyempurnaan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat bergantung pada semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, kemampuan dan ketulusan para penyelenggara, serta sangat bergantung pula pada petunjuk, rahmat, dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

LAMPIRAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2021

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**117.670.644.678,70**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**117.670.644.678,70**							**0,00**	
1.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**						**23.436.623.653,66**			**Tidak**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)				***100.00***									
			Nilai SAKIP OPD (Poin)				***80.00***									
			Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD				***3.00***									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)				***100.00***									
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.755.255.212,25			Tidak	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD (Persen)				*100.00*							*0.00*		
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						405.255.212,25							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)				*6.00*									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)				*6*	*405.255.212,25*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan						350.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Dokumen)				*3.00*									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Dokumen)				*3*	*350.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah						350.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)				*4.00*									
			Jumlah Data Sektoral yang Tersedia (Item)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)				*4*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah						350.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)				*2.00*									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*350.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000.000,00							-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2.00*									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*300.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan						10.698.798.846,87			Tidak	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup OPD (Persen)				*100.00*							*0.00*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.331.061.759,63							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya (Orang)				*80.00*									
			Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya (Orang)				*140*	*10.331.061.759,63*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						41.737.087,24							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan (Persen)				*100.00*									
			Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan (Persen)				*100*	*41.737.087,24*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi						42.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan				*1.00*									
			Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan (Laporan)				*1*	*42.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						40.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan (Laporan)				*1.00*									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan (Laporan)				*1*	*40.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						40.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan (Persen)				*100.00*									
			Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan (Persen)				*100*	*40.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						82.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun (Laporan)				*12.00*									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun (Laporan)				*12*	*82.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran						40.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun (Laporan)				*12.00*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun (Laporan)				*12*	*40.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran						40.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)				*4.00*									
			Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)				*4*	*40.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						42.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun (Laporan)				*1.00*									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun (Laporan)				*1*	*42.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Umum						9.080.000.000,00			Tidak	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)				*100.00*							*0.00*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						650.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Surat Menyurat yang Dikelola (Persen)				*100.00*									
			Persentase Surat Menyurat yang Dikelola (Persen)				*100*	*650.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						700.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan (Rekening)				*24.00*									
			Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan (Rekening Tagihan)				*24*	*700.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Jenis)				*2.00*									
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Unit)				*15*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan (Jenis)				*72.00*									
			Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan (Jenis)				*72*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan (Dokumen)				*1.00*									
			Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan (Orang)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						310.000.000,00							-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				*24.00*									
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin (Unit)				*24*	*110.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan (Unit)				*24*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Unit)				*2.00*									
			Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Unit)				*2*	*100.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				*12.00*									
			Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Bulan)				*4*	*100.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan (Bulan)				*12.00*									
			Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan (Bulan)				*20*	*100.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Alat Tulis Kantor						250.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan (Jenis)				*10.00*									
			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan (Jenis)				*10*	*250.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Barang yang Dicetak / Digandakan (Jenis)				*2.00*									
			Jumlah Barang yang Dicetak (Jenis)				*20*	*50.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Barang yang Digandakan (Buah)				*20*	*50.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)				*2.00*									
			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)				*2*	*100.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan (Jenis)				*2.00*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan (Jenis)				*2*	*120.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jenis)				*10*	*80.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						120.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)				*2.00*									
			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)				*2*	*120.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan (Jenis)				*6.00*									
			Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan (Jenis)				*6*	*100.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Makanan dan Minuman						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan (Jenis)				*2.00*									
			Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan (Jenis)				*2*	*100.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						850.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah (Laporan)				*12.00*									
			Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi / Konsultasi ke Dalam Daerah (Laporan)				*12*	*350.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah (Laporan)				*12*	*500.000.000,00*	*(Jakarta,Makasssar, Luar Wilayah)*							
		Pengadaan Mobil Jabatan						800.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan (Unit)				*1*	*800.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						500.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan (Unit)				*1*	*500.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan (Jenis)				*1.00*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan (Jenis)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						300.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (Jenis)				*1*	*300.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan (Jenis)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						300.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Jenis)				*1*	*300.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Mebeleur						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan (Jenis)				*1*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Rumah Jabatan (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Rumah Jabatan (Jenis)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Rumah Dinas (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Rumah Dinas (Unit)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, KAB. MAMUJU UTARA)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan (Jenis)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Jenis)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (Jenis)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)				*1*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (Jenis)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis)				*1*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan (Jenis)				*1.00*									
			Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan (Jenis)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Jabatan yang Direhabilitasi (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Rumah Jabatan yang Direhabilitasi (Jenis)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Dinas yang Direhabilitasi (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Rumah Dinas yang Direhabilitasi (Unit)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi (Unit)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi (Unit)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi (Unit)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						1.902.569.594,54			Tidak	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD (Persen)				*100.00*							*0.00*		
		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi						42.569.594,54							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Diadakan (Unit)				*4.00*									
			Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Diadakan (Unit)				*4*	*42.569.594,54*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						300.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan (Pasang)				*200.00*									
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan (Pasang)				*200*	*300.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan (Pasang)				*100.00*									
			Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan (Pasang)				*100*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Pakaian Korpri						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan (Pasang)				*100.00*									
			Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan (Pasang)				*100*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan (Pasang)				*200.00*									
			Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan (Pasang)				*200*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun						60.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya (Persen)				*100.00*									
			Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya (Persen)				*100*	*60.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas						50.000.000,00							-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya (Persen)				*100.00*									
			Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya (Persen)				*100*	*50.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pemindahan Tugas PNS						50.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase PNS yang Mendapatkan Fasilitasi Pindah Tugas (Orang)				*100.00*									
			Persentase PNS yang Mendapatkan Fasilitasi Pindah Tugas (Orang)				*100*	*50.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Pendidikan dan Pelatihan Formal						500.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)				*25.00*									
			Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)				*25*	*500.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						150.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Persen)				*100.00*									
			Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Persen)				*100*	*150.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Persen)				*100.00*									
			Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Persen)				*100*	*200.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
2.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**89.716.041.025,04**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kesehatan**
			Cakupan Mutu Layanan Upaya Kesehatan Perorangan yang Sesuai Standar (Persen)				***80.00***									
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan yang Dilaksanakan (Persen)				***80.00***									
			Cakupan Mutu Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standar (Persen)				***70.00***									
			Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Persen)				***100.00***									
			Cakupan Pencegahan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Persen)				***40.00***									
			Presentase Penduduk yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan (Persen)				***90.00***									
			Persentase Kab/Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas Secara Lengkap dan Tepat Waktu				***90.00***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Absolut Angka Kematian Ibu				***32.00***									
			Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup (Balita)				***8.00***									
			Prevalensi Stunting pada Balita (Persen)				***35.00***									
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						24.333.969.185,97			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak (Unit)				*1.00*							*0.00*		
			Persentase Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang Terakreditasi				*40.00*							*0.00*		
			Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Persen)				*30.00*							*0.00*		
			Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial (0)				*100.00*							*0.00*		
		Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						8.300.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak yang di Bangun Sarana dan Prasarana Pendukungnya (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak yang di Bangun Sarana dan Prasarana Pendukungnya (Unit)				*1*	*8.300.000.000,00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*							
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						450.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Terbangun (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Terbangun (Unit)				*1*	*450.000.000,00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Terbangun (Unit)				*1.00*									
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						450.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dikembangkan (Unit)				*2.00*									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dikembangkan (Unit)				*2*	*450.000.000,00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*							
		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)						7.750.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Layanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) (Kali)				*12.00*									
			Jumlah Layanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) (Kali)				*12*	*250.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Rumah Sakit Keliling yang Diadakan (Unit)				*1*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Keliling yang Diadakan (Unit)				*1*	*7.500.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						400.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Faskes yang Direhab/Pemeliharaan (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Faskes yang Direhab/Pemeliharaan (Unit)				*1*	*400.000.000,00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						600.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				*4.00*									
			Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (Unit)				*4*	*600.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						400.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sarana Difasilitas Layanan Kesehatan yang Tersedia (Unit)				*15.00*									
			Jumlah Sarana Difasilitas Layanan Kesehatan yang Tersedia				*15*	*400.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						450.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Prasarana Difasilitas Layanan Kesehatan yang Tersedia (Unit)				*2.00*									
			Jumlah Prasarana Difasilitas Layanan Kesehatan yang Tersedia				*2*	*450.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan						499.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan Laboratorium (Unit)				*10.00*									
			Jumlah Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan Laboratorium (Unit)				*10*	*499.000.000,00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan						350.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara (Unit)				*15.00*									
			Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara (Unit)				*15*	*350.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						2.154.276.105,97							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara (Gedung)				*2.00*									
			Jumlah Pasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara (Gedung)				*2*	*2.154.276.105,97*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						450.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Telemedicine yang Tersedia Difaskes (Unit)				*1.00*									
			Jumlah Telemedicine yang Tersedia Difaskes (Unit)				*1*	*450.000.000,00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						2.080.693.080,00							-	Dinas Kesehatan
			Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Kali0)				*12.00*									
			Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Kali)				*12*	*2.080.693.080,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						64.101.071.839,07			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting pada Balita usia 0-59 bln (Persen)				*35*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*30*		
			Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapat ASI (Persen)				*85.00*							*0.00*		
			Persentase Remaja Putri Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Persen)				*45.00*							*0.00*		
			Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan (Persen)				*75.00*							*0.00*		
			Persentase Kabupaten / Kota Sehat (Persen)				*30.00*							*0.00*		
			Persentase Puskesmas Melaksanakan Program Kesehatan Tradisional				*30.00*							*0.00*		
			Persentase Kabupaten / Kota Melaksanakan SKDR (Persen)				*75.00*							*0.00*		
			Cakupan desa / Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) (Persen)				*90.00*							*0.00*		
			Persentase Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat (Persen)				*80.00*		*(SULAWESI BARAT)*					*0.00*		
			Persentase Kab / Kota Endemis Filariasis Berhasil Menurunkan Angka Mikro Filariasis Menjadi <1 % (Persen)				*33.00*		*(SULAWESI BARAT)*					*0.00*		
			Prevalensi HIV AIDS Kurang <1 (Persen)				*0.00*		*(SULAWESI BARAT)*					*0.00*		
			Jumlah Kabupaten / Kota Dengan Eliminasi Malaria (Kabupaten)				*2.00*		*(SULAWESI BARAT)*					*0.00*		
			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Program Penyakit Menular yang Tersusun (Dokumen)				*1.00*		*(SULAWESI BARAT)*					*0.00*		
			Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular (/ 1.000 penduduk)				*50*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*45*		
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Persen)				*100.00*							*0.00*		
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi (Persen)				*100.00*							*0.00*		
			Persentase Provinsi dan Kabupaten Menyusun Pembiayaan Berbasis SPM Kesehatan (Persen)				*85.00*							*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4) (Persen)				*85.00*							*0.00*		
			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Persen)				*90.00*							*0.00*		
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (Persen)				*90.00*							*0.00*		
			Cakupan Kunjungan Bayi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Persen)				*90.00*							*0.00*		
			Cakupan Pelayanan Anak Balita (Persen)				*90.00*							*0.00*		
			Persentase Ibu Hamil KEK yang Mendapat Makanan Tambahan (Persen)				*85.00*							*0.00*		
			Persentase Puskesmas yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Persen)				*30.00*							*0.00*		
			Persentase Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (Persen)				*25.00*							*0.00*		
			Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Program Kesehatan Jiwa (Persen)				*75.00*							*0.00*		
			Persentase Jamaah Haji Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Persen)				*90.00*							*0.00*		
			Persentase Puskesmas yang Menyelanggarakan Program Kesehatan NAPZA (Persen)				*75.00*							*0.00*		
			Presentase Penduduk yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan (Persen)				*85.00*							*0.00*		
			Persentase FKTP Terakreditasi (Persen)				*75.00*							*0.00*		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana						636.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Atau Berpotensi Bencana (Jenis)				*15.00*									
			Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Atau Berpotensi Bencana (Jenis)				*15*	*180.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Tim Tenaga Kesehatan yang Dilatih Dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Tim)				*8.00*									
			Jumlah Tim Tenaga Kesehatan yang Dilatih Dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Tim)				*8*	*146.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Dokumen Mitigasi Berpontensi Krisis Kesehatan Akibat Bencana yang Tersusun (Dokumen)				*7.00*									
			Jumlah Dokumen Mitigasi Berpontensi Krisis Kesehatan Akibat Bencana yang Tersusun (Dokumen)				*7*	*80.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa Potensi Bencana yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pengurangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Desa)				*12.00*									
			Jumlah Desa Potensi Bencana yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pengurangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Desa)				*12*	*80.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Kasus Bencana / Potensi Bencana yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan (Kasus)				*6.00*									
			Jumlah Kasus Bencana / Potensi Bencana yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan (Kasus)				*6*	*150.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						460.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) (Jenis)				*7.00*									
			Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) (Jenis)				*7*	*180.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Tim Tenaga Kesehatan yang Dilatih Gerak Cepat Dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) (Tim)				*3.00*									
			Jumlah Tim Tenaga Kesehatan yang Dilatih Gerak Cepat Dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) (Tim)				*3*	*100.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Dokumen Kajian Epidemiologi yang Tersusun (Dokumen)				*1.00*									
			Jumlah Dokumen Kajian Epidemiologi yang Tersusun (Dokumen)				*1*	*70.000.000,00*	*(Kantor, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Kejadian Luar Biasa yang di Identifikasi Melalui Penyelidikan Epidemiologi (Kasus)				*5.00*									
			Jumlah Kejadian Luar Biasa yang di Identifikasi Melalui Penyelidikan Epidemiologi (Kasus)				*5*	*110.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						4.179.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Ibu Hamil Resiko Tinggi yang Mendapatkan Pendampingan (Orang)				*1000.00*									
			Jumlah Ibu Hamil Resiko Tinggi yang Mendapatkan Pendampingan				*1000*	*800.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Nakes di Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Nakes di Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil				*30*	*650.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (Orang)				*30.00*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (Orang)				*30*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pelatihan Antenatal Care Terstandar (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pelatihan Antenatal Care Terstandar (Orang)				*30*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Nakes yang Mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Nakes yang Mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (Orang)				*30*	*150.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Peserta TOT Audit Maternal Perinatal (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Peserta TOT Audit Maternal Perinatal (Orang)				*30*	*150.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Distric Team Problem (DPS) yang Mengikuti Pelatihan (Tim)				*7.00*									
			Jumlah Distric Team Problem (DPS) yang Mengikuti Pelatihan (Tim)				*7*	*153.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Bayi Resiko Tinggi yang Mendapatkan Pendampingan (Orang)				*100.00*									
			Jumlah Bayi Resiko Tinggi yang Mendapatkan Pendampingan (Orang)				*100*	*1.326.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Nakes yang Mendapatkan Orientasi MTBS (Manajamen Terpadu Balita Sakit) (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Nakes yang Mendapatkan Orientasi MTBS (Manajamen Terpadu Balita Sakit) (Orang)				*30*	*450.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Nakes Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Nakes Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak				*30*	*300.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						11.999.957.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus (Paket)				*2.00*									
			Jumlah Paket Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus (Paket)				*2*	*10.523.957.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Ibu Kekurangan Energi Kronis (KEK) Mendapatkan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Gizi (Orang)				*1000.00*							*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Kekurangan Energi Kronis (KEK) Mendapatkan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Gizi (Orang)				*1000*	*416.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapatkan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Gizi (Orang)				*300.00*									
			Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapatkan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Gizi (Orang)				*300*	*200.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Dokumen Hasil Pemutkhiran Data Dan Surveilans Gizi (Dokumen)				*1.00*									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemutkhiran Data Dan Surveilans Gizi (Dokumen)				*1*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Diseminasi Data Gizi (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Diseminasi Data Gizi (Orang)				*30*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas yang Dilatih Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang (Orang)				*103.00*									
			Jumlah Petugas yang Dilatih Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang (Orang)				*103*	*80.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Dokumen Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang yang Tersusun (Dokumen)				*7.00*									
			Jumlah Dokumen Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang yang Tersusun (Dokumen)				*7*	*70.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas yang Dilatih Konseling dan Edukasi Gizi (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Petugas yang Dilatih Konseling dan Edukasi Gizi (Orang)				*30*	*120.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Gizi yang Tersusun (Dokumen)				*2.00*									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Gizi yang Tersusun (Dokumen)				*2*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Desa MARASA yang Mendapatkan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak (Desa)				*12.00*									
			Jumlah Desa MARASA yang Mendapatkan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak (Desa)				*12*	*90.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Orang yang Mengikuti TOT Fasilitator PAGT (Pelayanan Asuhan Gizi Terpadu) (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Orang yang Mengikuti TOT Fasilitator PAGT (Pelayanan Asuhan Gizi Terpadu) (Orang)				*30*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Orang)				*23000.00*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Orang)				*23000*	*100.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						440.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Dibina (UKK)				*12.00*									
			Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Dibina (UKK)				*12*	*130.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar				*12.00*									
			Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar (PKM)				*12*	*130.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Pengawasan dan Pembinaan di Perusahaan yang Menyelenggarakan K3 (Perusahaan)				*12.00*									
			Jumlah Pengawasan dan Pembinaan di Perusahaan yang Menyelenggarakan K3 (Perusahaan)				*12*	*100.000.000,00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Diukur Tingkat Kebugarannya (Orang)				*100.00*									
			Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Diukur Tingkat Kebugarannya (Orang)				*100*	*80.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						935.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Desa)				*12.00*									
			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				*12*	*185.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas yang Dilatih Pengawasan Sarana Air Minum (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Petugas yang Dilatih Pengawasan Sarana Air Minum (Orang)				*30*	*150.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas Mendapatkan Pendampingan Pembinaan dan Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) (Petugas)				*50.00*									
			Jumlah Petugas Mendapatkan Pendampingan Pembinaan dan Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) (Petugas)				*50*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Pasar Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan yang Memenuhi Syarat Kesehatan (Pasar)				*4.00*									
			Jumlah Pasar Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan yang Memenuhi Syarat Kesehatan				*4*	*80.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas Mendapatkan Pendampingan Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) (Petugas)				*50.00*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petugas Mendapatkan Pendampingan Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) (Petugas)				*50*	*120.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Fasilitasi Kabupaten/Kota Sehat (Kab/Kota)				*1.00*									
			Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Fasilitasi Kabupaten/Kota Sehat (Kab/Kota)				*1*	*100.000.000,00*	*(1 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Sekolah yang Dilaksanakan Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) (Sekolah)				*12.00*									
			Jumlah Sekolah yang Dilaksanakan Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) (Sekolah)				*12*	*100.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan Tradisional (Desa)				*12*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*12*		
			Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan Tradisional (Desa)				*12*	*100.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						960.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Dalam Tatalaksana Kusta (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Orang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Dalam Tatalaksana Kusta (Orang)				*30*	*120.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Desa Yg Dilaksanakan Pemeriksaan Deteksi Cepat Kusta di Desa (Desa)				*50.00*									
			Jumlah Desa Yg Dilaksanakan Pemeriksaan Deteksi Cepat Kusta di Desa (Desa)				*50*	*150.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang Mendampingi Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis dan Kecacingan Dalam Rangka Intervensi Stunting (Puskemas)				*12.00*									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang Mendampingi Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis dan Kecacingan Dalam Rangka Intervensi Stunting (Puskesmas)				*12*	*120.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Orang yang Lakukan Skrining Populasi yang Bersiko HIV (Orang)				*500.00*									
			Jumlah Orang yang Lakukan Skrining Populasi yang Bersiko HIV (Orang)				*500*	*120.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Pengelola Malaria yang Mendapatkan Pelatihan Surveilance Migrasi dan Penyelidikan Epidmiologi (Orang)				*33.00*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelola Malaria yang Mendapatkan Pelatihan Surveilance Migrasi dan Penyelidikan Epidmiologi (Orang)				*33*	*150.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Pemetaan Vektor Malaria (Kabupaten)				*2.00*									
			Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Pemetaan Vektor Malaria (Kabupaten)				*2*	*150.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Bimbingan Teknis Program Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*6.00*									
			Bimbingan Teknis Program Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*6*	*150.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haii						300.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jamaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran (Orang)				*1000.00*									
			Jumlah Jamaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran				*1000*	*150.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Jamaah Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1000.00*									
			Jumlah Jamaah Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1000*	*150.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						430.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Lintas Sektor Bekerjasama Dengan Dinas Provinsi Dalam Penaganan Kesehatan Jiwa (Lintas Sektor)				*1.00*									
			Jumlah Lintas Sektor Bekerjasama Dengan Dinas Provinsi Dalam Penaganan Kesehatan Jiwa (Lintas Sektor)				*1*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Bimbingan Kesehatan Jiwa (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Bimbingan Kesehatan Jiwa (Orang)				*30*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas Kesehatan/Tokoh Masyakat/Lintas Sektor Terkait yang Mengikuti Sosialisasi Bebas Pasung (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Petugas Kesehatan/Tokoh Masyakat/Lintas Sektor Terkait yang Mengikuti Sosialisasi Bebas Pasung (Orang)				*30*	*110.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Satgas ODMK yang Terbentuk dan Difasilitasi (Satgas)				*7.00*									
			Jumlah Satgas ODMK yang Terbentuk dan Difasilitasi (Satgas)				*7*	*120.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA						220.000.000,00							-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Program NAPZA (Orang)				*90.00*									
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Program NAPZA (Orang)				*90*	*110.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Kabupaten Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Supervisi Program NAPZA (Kabupaten)				*6.00*									
			Jumlah Kabupaten Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Supervisi Program NAPZA (Kabupaten)				*6*	*110.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						41.291.114.839,07							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kebijakan Teknis Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Tersusun (Dokumen)				*7.00*									
			Jumlah Kebijakan Teknis Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Tersusun (Dokumen)				*7*	*150.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Kabupaten)				*6.00*									
			Jumlah Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Kabupaten)				*6*	*200.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Peserta yang Dipenuhi Iuran PBI-nya (Orang)				*234637.00*									
			Jumlah Peserta yang Dipenuhi Iuran PBI-nya (Orang)				*234637*	*40.941.114.839,07*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan						940.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Petugas Survelens yang Mendapatkan Pelatihan (Petugas)				*103.00*									
			Jumlah Petugas Survelens yang Mendapatkan Pelatihan (Petugas)				*103*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) (Puskesmas)				*95.00*									
			Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) (Puskesmas)				*95*	*120.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (Orang)				*50.00*									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (Orang)				*50*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Penemuan Kasus Penyakit yang Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)				*59.00*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penemuan Kasus Penyakit yang Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) (Kasus)				*59*	*100.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masaal yang Dilakukan (Kasus)				*5.00*									
			Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masaal yang Dilakukan (Kasus)				*5*	*90.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Anak Usia 0 - 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap				*29782.00*									
			Jumlah Anak Usia 0 - 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (Orang)				*29782*	*130.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapatkan Imunisasi (Orang)				*28363.00*									
			Jumlah Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapatkan Imunisasi (Orang)				*28363*	*130.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Anak Usia 18 - 24 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lanjutan (Orang)				*83513.00*									
			Jumlah Anak Usia 18 - 24 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lanjutan (Orang)				*83513*	*130.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Fasilitasi Coold Room (Unit)				*1.00*									
			Fasilitasi Coold Room (Unit)				*1*	*40.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota						330.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Peserta Koordinasi SPM Bidang Kesehatan (Orang)				*35.00*									
			Jumlah Peserta Koordinasi SPM Bidang Kesehatan (Orang)				*35*	*70.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Dokumen E-Costing SPM Bidang Kesehatan Kabupaten dan Provinsi yang Tersusun (Dokumen)				*7.00*									
			Jumlah Dokumen E-Costing SPM Bidang Kesehatan Kabupaten dan Provinsi yang Tersusun (Dukumen)				*7*	*80.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Kabupaten Mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)				*6.00*									
			Jumlah Kabupaten Mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)				*6*	*80.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Orang Mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Orang)				*200.00*									
			Jumlah Orang Mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Orang)				*200*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						280.000.000,00							-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan (Kabupaten)				*6.00*									
			Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan (Kabupaten)				*6*	*130.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Program Upaya Pelayanan Kesehatan (Orang)				*300.00*									
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Program Upaya Pelayanan Kesehatan (Orang)				*300*	*150.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas						185.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Verifikasi Untuk Registrasi Puskesmas				*2.00*									
			Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Verifikasi Untuk Registrasi Puskesmas (Puskesmas)				*2*	*185.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						110.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas yang Menggunakan Aplikasi SPGDT (PKM dan RS)				*108.00*									
			Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas yang Menggunakan Aplikasi SPGDT (PKM dan RS)				*108*	*110.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional						100.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Spesimen Penyakit Potensial KLB yang Dikirimkan ke Lab Rujukan / Nasional (Jenis)				*5.00*									
			Jumlah Jenis Spesimen Penyakit Potensial KLB yang Dikirimkan ke Lab Rujukan / Nasional (Jenis)				*5*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						225.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pendampingan (Faskes)				*18.00*									
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pendampingan (Faskes)				*18*	*100.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Mendapatkan Pendampingan Sistem Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED) (FKTP)				*12.00*									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Mendapatkan Pendampingan Sistem Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED) (FKTP)				*12*	*75.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit yang Mendapatkan Pendampingan Sistem Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) (RS)				*4.00*									
			Jumlah Rumah Sakit yang Mendapatkan Pendampingan Sistem Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) (Rumah Sakit)				*4*	*50.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Penelitian Kesehatan						30.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penelitian Kesehatan yang Dilaksanakan (Penelitian)				*1.00*									
			Jumlah Penelitian Kesehatan yang Dilaksanakan (Penelitian)				*1*	*30.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana						50.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Penilaiaan / Appraisal Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana (Kabupaten)				*6.00*									
			umlah Kabupaten yang Mendapatkan Penilaiaan / Appraisal Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana (Kabupaten)				*6*	*50.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						505.000.000,00			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Persentase Provinsi dan Kabupaten Menyusun Profil Kesehatan (Persen)				*90.00*							*0.00*		
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						225.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pengelola Data yang Mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Orang)				*127.00*									
			Jumlah Pengelola Data yang Mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Orang)				*127*	*80.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Peserta Pemutakhiran Data, Diseminasi dan Analisis Data Kesehatan (Orang)				*90.00*									
			Jumlah Peserta Pemutakhiran Data, Diseminasi dan Analisis Data Kesehatan (Orang)				*90*	*80.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Puskesmas Mendapatkan Pembinaan Analisis Data Kesehatan (Puskesmas)				*18.00*									
			Jumlah Puskesmas Mendapatkan Pembinaan Analisis Data Kesehatan (Puskesmas)				*18*	*40.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Profil Anggaran Kesehatan yang Tersusun (Dokumen)				*1.00*									
			Jumlah Profil Anggaran Kesehatan yang Tersusun (Dokumen)				*1*	*25.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						160.000.000,00							-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Orang)				*15.00*									
			Jumlah Orang Mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Orang)				*15*	*80.000.000,00*	*(DInkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Pelatihan Aplikasi Kawal Ibu Hamil (Orang)				*250.00*									
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Pelatihan Aplikasi Kawal Ibu Hamil (Orang)				*50*	*80.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet						120.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Aplikasi Kesehatan yang Diadakan (Aplikasi)				*2.00*									
			Jumlah Aplikasi Kesehatan yang Diadakan (Applikasi)				*2*	*50.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Jenis Software dan Hardware yang Diadakan (Jenis)				*3.00*									
			Jumlah Jenis Software dan Hardware yang Diadakan (Jenis)				*3*	*50.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Website Dinas Kesehatan yang Dikembangkan (Website)				*1.00*									
			Jumlah Website Dinas Kesehatan yang Dikembangkan (Website)				*1*	*20.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						776.000.000,00			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi (Persen)				*50.00*							*0.00*		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						151.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Pengawasan dan Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS)				*2.00*									
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Pengawasan dan Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit)				*2*	*151.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						485.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Peserta Pertemuan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Peserta Pertemuan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik (Faskes)				*7*	*180.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Rumah Sakit Mendapatkan Pembinaan Rujukan dan Rujuk Balik (RS)				*11.00*									
			Jumlah Rumah Sakit Mendapatkan Pembinaan Rujukan dan Rujuk Balik (Orang)				*30*	*150.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Mendapatkan Pembinaan Rujukan dan Rujukan Balik				*11*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*11*		
			Jumlah Rumah Sakit Mendapatkan Pembinaan Rujukan dan Rujukan Balik (Rumah Sakit)				*11*	*155.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						140.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Peserta Workshop Standarisiasi Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (Orang)				*108.00*									
			Jumlah Peserta Workshop Standarisiasi Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (Orang)				*108*	*140.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
3.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**1.504.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase Peningkatan Jenis dan Pemerataan Tenaga Kesehatan (Persen)				***75.00***									
			Persentase Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Persen)				***70.00***									
			Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih (Persen)				***80.00***									
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						953.000.000,00			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Persen)				*85.00*							*0.00*		
			Persentase Puskesmas Tanpa Dokter (Persen)				*85.00*							*0.00*		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						653.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang Diadakan Melalui Kontrak Provinsi (Orang)				*15.00*									
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang Diadakan Melalui Kontrak Provinsi (Orang)				*50*	*400.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah MOU Dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi yang Tersusun				*2.00*									
			Jumlah MOU Dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi yang Tersusun (MoU)				*2*	*253.000.000,00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*							
		Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						300.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Pemerataan SDM Kesehatan (Orang)				*35.00*									
			Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Pemerataan SDM Kesehatan (Orang)				*35*	*300.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						551.000.000,00			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persen)				*30.00*							*0.00*		
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						471.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan (Orang)				*60.00*									
			Jumlah Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan (Orang)				*60*	*200.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Tenaga Kesehatan Dengan Jabatan Fungsional Kesehatan yang Mendapatkan Uji Komptensi (Orang)				*20.00*									
			Jumlah Tenaga Kesehatan Dengan Jabatan Fungsional Kesehatan yang Mendapatkan Uji Komptensi (Orang)				*20*	*101.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan (Orang)				*150.00*									
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan (Orang)				*150*	*170.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						80.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Dokumen Monitoring Evaluasi Program SDM Kesehatan yang Tersusun (Jenis)				*5.00*									
			Jumlah Jenis Dokumen Monitoring Evaluasi Program SDM Kesehatan yang Tersusun (Jenis)				*5*	*80.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
4.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**1.198.840.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase Layanan Perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat				***100.00***									
			Persentase Layanan Perizinan pada Usaha Kecil Obat Tradisional (Persen)				***100.00***									
			Persentase Penggunaan Obat Rasional (Persen)				***80.00***									
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						348.000.000,00			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Persentase Produk Alkes dan PKRT Diperedaran yang Memenuhi Standar (Persen)				*70.00*							*0.00*		
		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak						148.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pembinaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Diterbitkan yang Sesuai Standar (PBF/PAK)				*5.00*									
			Jumlah Pembinaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Diterbitkan yang Sesuai Standar (PBF/PAK)				*5*	*148.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik						200.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Ijin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Diterbitkan (Ijin)				*5.00*									
			Jumlah Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Diterbitkan (Izin)				*5*	*200.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.1.02	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						850.840.000,00			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Diperedaran yang Memenuhi Standar (Persen)				*70.00*							*0.00*		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional						218.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional Berizin yang Diawasi (Usaha)				*10.00*									
			Jumlah Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional Berizin yang Diawasi (Usaha)				*10*	*75.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional Berizin yang Diterbitkan (Usaha)				*10.00*									
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional Berizin yang Diterbitkan (Usaha)				*10*	*68.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Industri Rumah Tangga , Pangan yang Dibina (IRT-P)				*30.00*									
			Jumlah Industri Rumah Tangga , Pangan yang Dibina (IRT-P)				*30*	*75.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik						632.840.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Petugas Kesehatan Mendapatkan Bimbingan Teknis Keamanana Pangan (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Petugas Kesehatan Mendapatkan Bimbingan Teknis Keamanana Pangan (Orang)				*30*	*160.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Puskesmas yang Dilaksanakan Pemantauan Indikator Ketersediaan Obat dan Vaksin (PKM)				*24.00*									
			Jumlah Puskesmas yang Dilaksanakan Pemantauan Indikator Ketersediaan Obat dan Vaksin (Puskesmas)				*24*	*118.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Kabupaten Dilaksanakan Pemantauan Indikator Penggunaan Obat Rasional (Ispa Non Pneumonia, Diare Non Spesifik, Myalgia) (Kabupaten)				*6.00*									
			Jumlah Kabupaten Dilaksanakan Pemantauan Indikator Penggunaan Obat Rasional (Ispa Non Pneumonia, Diare Non Spesifik, Myalgia) (Kabupaten)				*6*	*94.840.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pertemuan dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian (Orang)				*50.00*									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pertemuan dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian (Orang)				*50*	*100.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas Kesehatan Sosialisasi e_Monev Katalog Obat Dalam mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP Untuk Unit Layanan (Orang)				*50.00*									
			Jumlah Petugas Kesehatan Sosialisasi e_Monev Katalog Obat Dalam mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP Untuk Unit Layanan (Orang)				*50*	*160.000.000,00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*							
5.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.815.140.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase Kabupaten yang Menetapkan Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan (Persen)				***100.00***									
			Persentase Kabupaten/kota yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Persen)				***100.00***									
			Persentase Desa yang Melaksanakan UKBM (Persen)				***75.00***									
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						965.000.000,00			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Persentase Dunia Usaha/Ormas/LSM yang Memanfaatkan Sumber Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan (Persen)				*70.00*							*0.00*		
			Persentase Kabupaten yang Memiliki Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan (Persen)				*50*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*50*		
			Persentase Kabupaten yang Memiliki Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan (Persen)				*50*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*50*		
		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						965.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Mendukung Program Kesehatan (Lembaga)				*6.00*									
			Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Mendukung Program Kesehatan (Lembaga)				*6*	*150.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Perkemahan Saka Bakti Husada Tingkat Daerah Sulawesi Barat (Orang)				*500.00*									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Perkemahan Saka Bakti Husada Tingkat Daerah Sulawesi Barat (Orang)				*500*	*100.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pembina Saka Bakti Husada yang Mengikuti Kursus Mahir Dasar (Orang)				*120.00*									
			Jumlah Pembina Saka Bakti Husada yang Mengikuti Kursus Mahir Dasar (Orang)				*120*	*100.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Desa Marasa Mendapatkan Pendampingan Pembinaan Desa Siaga				*12.00*									
			Jumlah Desa Marasa Mendapatkan Pendampingan Pembinaan Desa Siaga (Desa)				*12*	*145.000.000,00*	*(6 kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Intervensi GERMAS (Kabupaten)				*2.00*									
			Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Intervensi GERMAS (Kabupaten)				*2*	*150.000.000,00*	*(6 kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Regulasi Kesehatan (Kawasan Tanpa Rokok, ASI , PIS PK) (Regulasi)				*3.00*									
			Jumlah Regulasi Kesehatan (Kawasan Tanpa Rokok, ASI , PIS PK) (Regulasi)				*3*	*150.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kesehatan (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kesehatan (Orang)				*30*	*170.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah						850.140.000,00			Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan
			Persentase Kabupaten / Kota yang Memiliki Kebijakan PHBS (Persen)				*50.00*							*0.00*		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						850.140.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Penyebaran Media Informasi Kesehatan (Jenis)				*3.00*									
			Jumlah Jenis Penyebaran Media Informasi Kesehatan (Jenis)				*3*	*120.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Studio Informasi Kesehatan (Studio)				*1.00*									
			Jumlah Studio Informasi Kesehatan (Studio)				*1*	*169.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Orang Mendaptkan Advokasi Kebijakan Publik yang Berwawasan kesehatan (Orang)				*350.00*									
			Jumlah Orang Mendaptkan Advokasi Kebijakan Publik yang Berwawasan kesehatan (Orang)				*350*	*120.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Konselor Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa MARASA (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Konselor Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa MARASA (Orang)				*30*	*150.000.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Workshop Desain Grafis dan Multimedia Kesehatan (Orang)				*60.00*									
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Workshop Desain Grafis dan Multimedia Kesehatan (Orang)				*60*	*170.140.000,00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Pelatihan Publik Speaking Bidang Kesehatan (Orang)				*30.00*									
			Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Pelatihan Publik Speaking Bidang Kesehatan (Orang)				*30*	*121.000.000,00*	*(6 kabupaten, SULAWESI BARAT)*							
	J U M L A H							**117.670.644.678,70**							-	

Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jl.KH.Abd. Malik Pattana Endeng Rangas, Mamuju 91511
Email dinkessulbar@gmail.com, *Website*: https.dinkes.sulbarprov.go.id/